

# APBD 2010 KH Wajar dengan Pengecualian

PUTUSSIBAU. Kinerja keuangan daerah Kapuas Hulu (KH) pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2009. Sebab, berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI APBD Kapuas Hulu dinilai mengalami peningkatan dengan mendapat opini wajar dengan pengecualian.

"Ini tentu suatu prestasi yang membanggakan dimana pada tahun sebelumnya kita mendapat opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan pemerintah daerah Kapuas Hulu," kata AM Nasir, Bupati Kapuas Hulu, pada saat membacakan pidato pada acara penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2010.

Nasir berharap dengan kemajuan ini di masa yang akan datang kinerja semakin baik sehingga mendapat opini wajar tanpa pengecualian. "Harapan

kita ke depannya pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik," harapnya.

Untuk tahun 2011, kata Nasir, sudah dilakukan dua tahap pemeriksaan, yakni pemeriksaan pendahuluan selama kurang lebih satu bulan.

Mulai akhir Januari sampai Februari dan dilanjutkan pemeriksaan kurang lebih satu bulan dari bulan Mei sampai Juni 2011.

"Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah diperiksa oleh BPK RI, hasil pemeriksaan tersebut sebagai amanah pasal 103 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 (PP 58/2005), menyatakan kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Atas laporan keuangan pemerintah daerah setelah

melakukan penyesuaian atas laporan keuangan tersebut barulah disampaikan kepada dewan," tegas Nasir.

Perihal penyusunan APBD 2010 sendiri, kata Nasir, berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 13/2006 tentang pedoman pengelolaan pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mendagri 59/2007. "Antara lain mengatur tatacara penyusunan APBD, penatausahaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah," kupasnya.

Sesuai amanat peraturan pemerintah (PP) 24/2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai standar akuntansi pemerintah. "Sehingga pada pelaksanaannya perlu melakukan konversi atau penyesuaian



Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir menyerahkan berkas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010 kepada Ketua DPRD,

laporan keuangan dari format berdasarkan laporan Mendagri 13/2006 kepada format yang

disesuaikan kepada peraturan pemerintah 24/2005," kupas Nasir terperinci. (lil)